



**KABUPATEN KABUPATEN  
PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**



***PROFIL GENDER DAN  
ANAK***



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 463/ /Kpts/BPT-PS/2020**  
**TANGGAL : SEPTEMBER 2020**  
**TENTANG PROFIL GENDER DAN ANAK TAHUN 2020**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT serta Selawat beriring salam kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW sehingga penulisan “Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2020” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Dalam buku ini disajikan Profil Gender dan Anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Organisasi Perempuan, dan LSM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Bapak/Ibu anggota Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran/pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini

Dan kepada segenap Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya, atas kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam membangun Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021, dengan harapan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah diraih selama ini, dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk senantiasa meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan mengabdikan semua do'a, harapan serta usaha kita bersama, amin.

Painan, September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	Ii
DAFTAR GAMBAR .....	V
DAFTAR TABEL .....	Vii
BAB I	
1 Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Sumber data .....	3
D. Sistematika Penyajian .....	4
BAB II	
: Struktur Penduduk .....	
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	7
B. Penduduk Menurut Umum dan Jenis Kelamin .....	8
C. Penduduk Produktif .....	10
BAB III	
: Pendidikan .....	
A. Angka Partisipasi Kasar .....	13
B. Angka Partisipasi Murni .....	16
C. Angka Partisipasi Sekolah .....	18
D. Angka Buta Huruf .....	20
E. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	20
BAB IV	
: Kesehatan dan Keluarga Berencana .....	
A. Angka Harapan Hidup .....	23
B. Angka Kematian Ibu .....	24
C. Cakupan Pertolongan Persalinan .....	26
D. Kunjungan Ibu Hamil (K1 / K4) .....	26
E. Penderita HIV/AIDS .....	28
F. Keluarga Berencana .....	29

	G.	Usia Perkawinan Pertama .....	31
BAB V	:	Ketenagakerjaan .....	
	A.	Penduduk Usia Kerja .....	34
	B.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	36
	C.	Penduduk yang Bekerja .....	37
	D.	Status Pekerjaan .....	38
BAB VI	:	Perempuan di Sektor Publik .....	
	A.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif .....	40
	B.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif .....	43
	C.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif .....	46
	D.	Organisasi Perempuan .....	48
BAB VII	:	Hukum dan Sosial Budaya .....	
	A.	Penghuni Lembaga Permasyarakatan .	51
	B.	Penduduk Lanjut Usia .....	51
	C.	Penyandang Cacat .....	53
	D.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi ....	54
	E.	Perempuan Kepala Rumah Tangga .....	56
BAB VIII	:	Kesejahteraan Perlindungan Anak .....	
	A.	Tumbuh Kembang Anak .....	58
	1.	Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Non Formal .....	59
	2.	Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Non Formal .....	60
	B.	Kelangsungan Hidup Anak Bayi .....	
	1.	Angka Kematian (AKB) .....	61
	2.	Angka Kematian Balita (AKBA) ..	62

	3.	Pemberian Air Susu Ibu .....	64
	4.	Kepemilikan Akta Kelahiran .....	65
	C.	Perlindungan Anak .....	
	1.	Anak Jalanan .....	67
	2.	Pekerja Anak .....	67
	3.	Anak Terlantar .....	67
	4.	Anak Bermasalah dengan Hukum .....	68
BAB IX	:	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak .	
	A.	Kekerasan Terhadap Perempuan .....	71
	B.	Kekerasan Terhadap Anak .....	74
BAB X	:	Penutup .....	
	A.	Kesimpulan .....	76
	B.	Saran .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Sex Ratio</i> Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2019.....	8
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	10
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	10
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	11
Gambar 2.5	Presentase Penduduk Produktif Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	11
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 .....	14
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019....	16
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	18
Gambar 3.4	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	21
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019.....	23
Gambar 4.2	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	25
Gambar 4.3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019.....	26
Gambar 4.4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 .....	27
Gambar 4.5	Jumlah Kasus HIV/AIDS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	29
Gambar 4.6	Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang mendapatkan Penyuluhan tentang KesehatanHIV/AIDS yang Dirawat Tahun 2019...	29
Gambar 4.7	Jumlah Target dan Realisasi Penduduk yang Memakai Alat KB Tahun 2019.....	31
Gambar 4.8	Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2019.....	33
Gambar 5.1	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok	35

	Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	
Gambar 5.2	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	36
Gambar 5.3	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	37
Gambar 5.4	Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Pesisir Selat Tahun 2019.....	39
Gambar 6.1	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	44
Gambar 6.2	Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	45
Gambar 6.3	Jumlah Camat, Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	46
Gambar 6.4	Jumlah Jaksa Menurut Jenis Kelamin dan Golongan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	46
Gambar 6.5	Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	48
Gambar 7.1	Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kab. Pesisir Selatan Tahun 2019.....	52
Gambar 7.2	Jumlah Perkara Cerai Hidup di Kabupaten Pesisir .....	56
Gambar 8.1	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	61
Gambar 8.2	Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	64
Gambar 9.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	8
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	9
Tabel 3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin Perkecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	15
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, Perkecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 .....	17
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	19
Tabel 4.1	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	25
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 .....	30
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Yang Pernah Kawin/Cerai menurut kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	32
Tabel 5.1	Angkatan Kerja (Orang) Menurut Usia Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	37
Tabel 5.2	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang selalu menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	38
Tabel 6.1	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2014-2019.....	41

Tabel 6.2	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2014-2019	42
Tabel 6.3	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	43
Tabel 7.1	Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tahun 2019.....	51
Tabel 7.2	Jumlah Lansia Terlantar Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	51
Tabel 7.3	Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	53
Tabel 7.4	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 .....	54
Tabel 7.5	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	56
Tabel 8.1	Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Me Menurut Lembaga, Murid, Guru dan Kecaatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	59
Tabel 8.2	Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Me Menurut Lembaga, Murid, Guru dan Kecaatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	60
Tabel 8.3	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	62
Tabel 8.4	Jumlah Kematian Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	63
Tabel 8.5	ASI Eksklusif menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 .....	64

Tabel 8.6	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Menurut Kecamatan dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	64
Tabel 8.7	Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	69
Tabel 9.1	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.	73
Tabel 9.3	Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019...	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Namun jika diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan gender tersebut.

Kesetaraan Gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional

menyatakan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 berjumlah 463,923 Jiwa yang terdiri dari jiwa laki-laki dan 253.812 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 102,14. Struktur umur penduduk Pesisir Selatan masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 15 tahun tergolong tinggi yaitu 13,08 persen sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 4,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak.

Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data

dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusun buku **“Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020”**.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan buku profil gender dan anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan kondisi perempuan dibanding laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

## **C. Sumber Data**

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan, Kapolres Kabupaten Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Painan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Nomor: 460/80/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Februari 2019.

## **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penyajian

### **BAB II : Struktur Penduduk**

- A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif

### **BAB III : Pendidikan**

- A. Angka Partisipasi Kasar
- B. Angka Partisipasi Murni
- C. Angka Partisipasi Sekolah
- D. Angka Melek Huruf
- E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

### **BAB IV : Kesehatan dan Keluarga Berencana**

- A. Angka Harapan Hidup
- B. Angka Kematian Ibu
- C. Cakupan Pertolongan Persalinan
- D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
- E. Penderita HIV/AIDS
- F. Keluarga Berencana
- G. Usia Perkawinan Pertama
- H. Penggunaan NAPZA

### **BAB V : Ketenagakerjaan**

- A. Penduduk Usia Kerja
- B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

- C. Penduduk yang Bekerja
- D. Status Pekerjaan

BAB VI : Perempuan di Sektor Publik

- A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif
- B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
- C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
- D. Organisasi Perempuan

BAB VII : Hukum dan Sosial Budaya

- A. Penghuni Lembaga Perumahan
- B. Penduduk Lanjut Usia
- C. Penyandang Cacat
- D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

BAB VIII : Kesejahteraan Perlindungan Anak

- A. Tumbuh Kembang Anak
  - 1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal
  - 2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal
- B. Kelangsungan Hidup Anak
  - 1. Angka Kematian Bayi (AKB)
  - 2. Angka Kematian Balita (AKBA)
  - 3. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
  - 4. Kepemilikan Akte Kelahiran
- C. Perlindungan Anak
  - 1. Anak Jalanan
  - 2. Pekerja Anak
  - 3. Anak Terlantar
  - 4. Anak Bermasalah Hukum

BAB IX : Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- A. Kekerasan Terhadap Perempuan
- B. Kekerasan Terhadap Anak

BAB X : Penutup  
A. Kesimpulan  
B. Saran

## **BAB II**

### **STRUKTUR PENDUDUK**

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai SDM yang trampil dan handal. Penduduk merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus

#### **A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Proyeksi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 511.725 jiwa terdiri dari 257.913 jiwa laki-laki dan 253.812 jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 98,58. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

**Tabel 2.1**  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Ratio
		L	P	Jumlah	
1	Koto XI Tarusan	27.136	26.712	53.848	101.59
2	Bayang	21.618	21.728	43.346	99.49
3	IV Nagari Bayang Utara	4.302	4.379	8.681	98.24
4	IV Jurai	26.006	25.740	51.746	101.03
5	Batang Kapas	18.807	18.789	37.596	100.10
6	Sutera	28.874	28.316	57.190	101.97
7	Lengayang	31.463	31.089	62.552	101.20
8	Ranah Pesisir	17.079	17.187	34.266	99.37
9	Linggo Sari Baganti	25.251	24.611	49.862	102.60
10	Airpura	9.309	8.879	18.188	104.84
11	Pancung Soal	13.206	12.834	26.041	102.89
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	7.878	7.601	15.479	103.64
13	Basa Ampek Balai Tapan	7.849	7.798	15.647	100.65
14	Lunang	11.206	10.741	21.947	104.33
15	Silaut	7.929	7.407	15.336	107.05
<b>Total</b>		<b>257.913</b>	<b>253.812</b>	<b>511.725</b>	<b>101.62</b>
<b>Hasil Proyeksi<sup>1</sup></b>					<b>98.58</b>

*Catatan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*

*Sumber: Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan*

*Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Lengayang yaitu berjumlah 62.552 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu berjumlah 8.681 jiwa.

Dengan berimbanganya jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki di Kabupaten Pesisir Selatan, maka kebijakan dan program-program pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek sesuai kebutuhan gender.

## **B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk

Indonesia didominasi oleh penduduk muda yang ditandai dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 0 – 4 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran pada periode 5 tahun terakhir cukup tinggi.

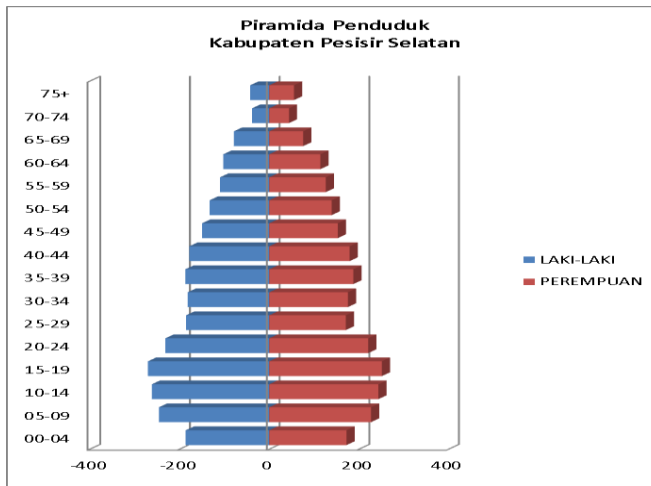
**Tabel 2.2**

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
1	0-4	18.602	17.240	35.842
2	5-9	24.580	22.723	47.303
3	10-14	26.161	24.365	50.526
4	15-19	27.009	25.128	52.137
5	20-24	23.125	22.089	45.214
6	25-29	18.520	17.084	35.604
7	30-34	18.165	17.555	35.720
8	35-39	18.697	18.770	37.467
9	40-44	17.797	17.960	35.757
10	45-49	14.961	15.302	30.263
11	50-54	13.274	13.955	27.229
12	55-59	10.941	12.633	23.574
13	60-64	10.214	11.449	21.663
14	65-69	7.847	7.599	15.446
15	70-74	3.794	4.413	8.207
16	75+	4.226	5.547	9.773
<b>Pesisir Selatan</b>		257.913	253.812	511.725

Piramida penduduk Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.2 yang menunjukkan bahwa 96.352 jiwa (37,39 persen) penduduk Pesisir Selatan adalah anak-anak laki-laki usia 0 – 19 tahun dan 89,456 jiwa (35,24 persen) penduduk Pesisir Selatan adalah anak perempuan. Sedangkan penduduk lanjut usia sebanyak 15.867 jiwa (3.10 persen) laki-laki dan 17.559 jiwa (3,43 persen) lansia perempuan. Dengan tingginya persentase penduduk usia 0 – 19 tahun, maka kebijakan dan program-program pembangunan seyogyanya difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan

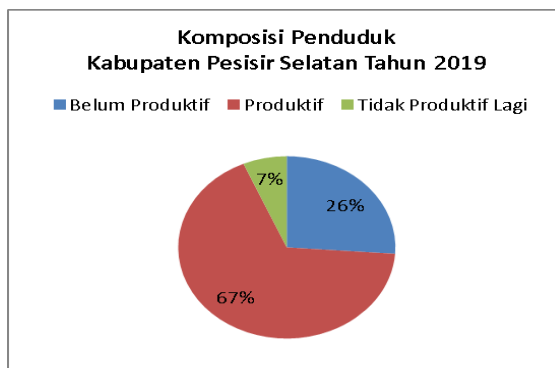
hak anak.



Gambar 2.2  
Peramida  
Penduduk  
Kabupaten Pesisir  
Selatan Tahun  
2019

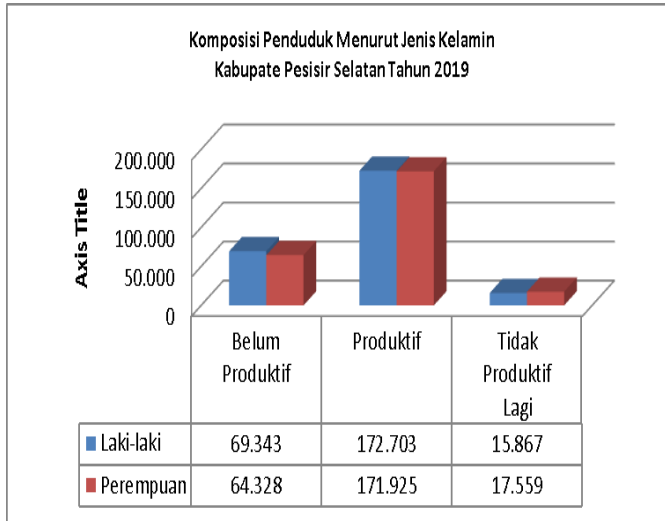
### C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15 – 64 tahun), belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).



Gambar 2.3  
Komposisi Penduduk  
menurut kelompok umur  
Produktif Kabupaten  
Pesisir Selatan Tahun  
2019  
*Sumber : Catatan Sipil  
Tahun 2020*

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa sebanyak 133.671 jiwa (26,12 persen) penduduk Pesisir Selatan berusia 0 – 14 tahun, 344.628 jiwa (67,35 persen) penduduk berusia 15 – 64 tahun, dan 33.426 jiwa (6,53 persen) penduduk berusia 65 tahun ke atas.



Gambar

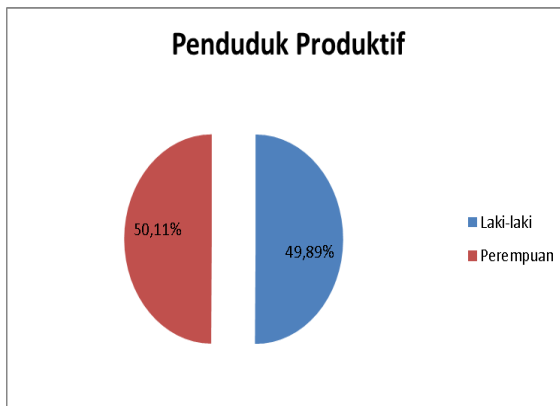
2.4

Komposisi Penduduk menurut Kolompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Sumber :

Capil 2020

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa komposisi penduduk produktif berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 33,75 berbanding 33,59. Pada kelompok usia penduduk tidak produktif lagi, penduduk berjenis kelamin laki-laki sedikit dari perempuan, yaitu masing-masing 13,55 dan 12,57 persen.



Gambar 2.5

Presentase Penduduk Produktif menurut jenis kelamin

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Sumber : Capil 2020

Gambar 2.5 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk produktif perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, yaitu 49,89 persen berbanding 50,11 persen.

### **BAB III**

## **PENDIDIKAN**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang dapat diukur dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan terutama dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik

tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

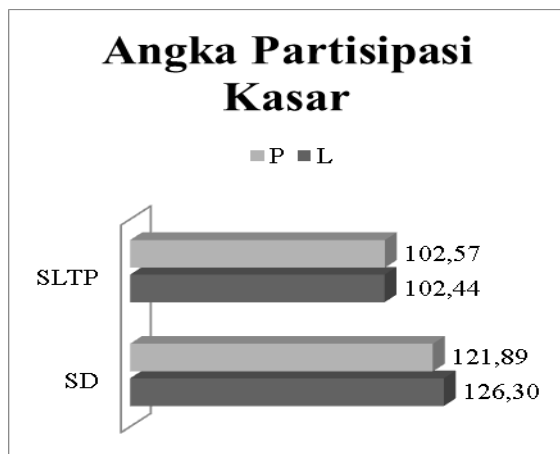
Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada Bab ini. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **A. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 3.1  
 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019  
*Sumber : Diknas 2020*  
**Catatan : Data SLTA berada di Propinsi**

Gambar 3.1 menunjukkan jumlah anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang bersekolah tahun 2019 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) melebihi nilai 100 persen, yaitu berjumlah 124,10 Pارسen dimana 126,30 persen pada laki-laki dan 121,89 persen pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Angka Partisipasi Kasar cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada pendidikan

tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	SD			SLTP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Koto XI Tarusan	135,06	126,31	130,69	79,40	73,10	76,25
2	Bayang	128,32	131,27	129,80	77,05	89,74	83,40
3	IV Nagari Bayang Utara	137,93	125,85	131,89	84,23	81,06	82,65
4	IV Jurai	135,39	132,12	133,76	125,81	124,56	125,19
5	Batang Kapas	149,53	142,50	146,01	105,21	113,87	109,54
6	Sutera	123,99	107,87	115,93	92,06	90,76	91,41
7	Lengayang	127,39	121,82	124,61	105,53	109,98	107,75
8	Ranah Pesisir	120,76	114,40	117,58	113,67	109,27	111,47
9	Linggo Sari Baganti	112,16	111,70	111,93	100,81	112,30	106,55
10	Airpura	115,37	110,28	112,82	89,26	98,11	93,68
11	Pancung Soal	122,74	122,38	122,56	113,18	104,61	108,90
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	131,54	119,83	125,69	116,74	98,95	107,85
13	Basa Ampek Balai Tapan	109,33	102,59	105,96	102,58	105,69	104,14
14	Lunang	103,80	113,82	108,81	124,16	114,77	119,46
15	Silaut	141,23	145,59	143,41	106,99	111,82	109,40
	<b>Total</b>	<b>126,30</b>	<b>121,89</b>	<b>124,10</b>	<b>102,44</b>	<b>102,57</b>	<b>102,51</b>

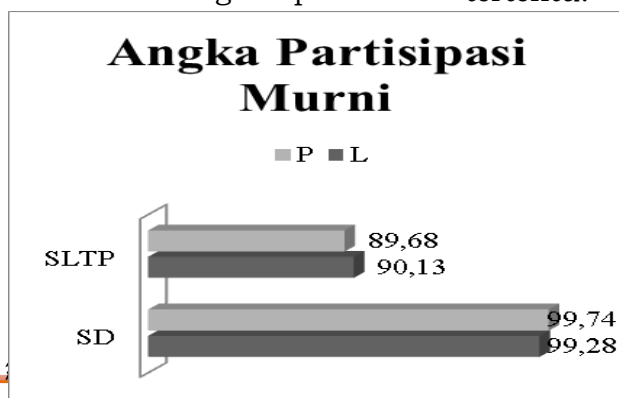
Sumber: Diknas Pessel 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu pada anak perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 46,49 persen dan anak laki-laki di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 47,33 persen.

## B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.



Gambar 3.2  
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019  
Sumber : Diknas 2019  
Catatan : Data SLTA berada di Propinsi

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Selatan proporsi penduduk Pesisir Selatan yang sekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah 99,28 persen laki-laki dan 99,74 persen perempuan. Angka tersebut menunjukkan penurunan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu berkisar 99,51 persen.

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut jenis kelamin,  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

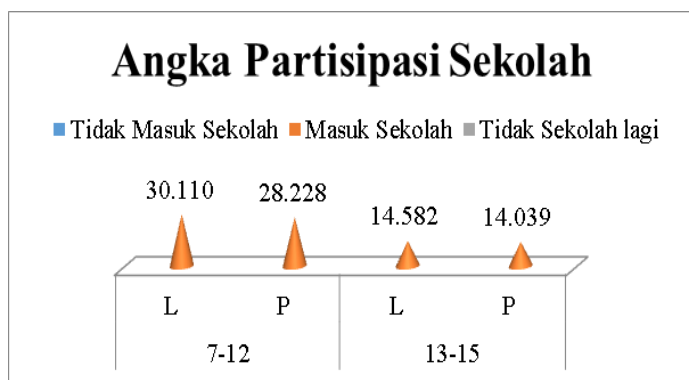
NO.	KECAMATAN	SD			SLTP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Koto XI Tarusan	100,37	96,58	98,48	90,21	92,71	91,46
2	Bayang	100,18	100,37	100,27	77,88	90,57	84,23
3	IV Nagari Bayang Utara	100,43	99,83	100,13	85,06	81,89	83,48
4	IV Jurai	97,00	99,56	98,28	95,45	90,81	93,13
5	Batang Kapas	97,43	99,65	98,54	91,26	93,02	92,14
6	Sutera	98,63	99,67	99,15	92,89	91,59	92,24
7	Lengayang	99,67	99,65	99,66	92,91	97,10	95,01
8	Ranah Pesisir	97,49	100,06	98,77	95,61	93,63	94,62
9	Linggo Sari Baganti	97,45	98,40	97,92	93,01	98,17	95,59
10	Airpura	100,62	100,29	100,45	90,09	81,21	85,65
11	Pancung Soal	98,66	100,58	99,62	94,57	97,27	95,92
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	99,61	99,79	99,70	100,94	91,15	96,05
13	Basa Ampek Balai Tapan	106,83	106,82	106,83	88,42	93,62	91,02
14	Lunang	95,50	95,16	95,33	94,88	82,43	88,65
15	Silaut	99,35	99,65	99,50	91,87	90,00	90,94
	<b>Total</b>	<b>99,28</b>	<b>99,74</b>	<b>99,51</b>	<b>90,13</b>	<b>89,68</b>	<b>91,34</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Airpura yaitu 106,83 pada laki-laki dan 100,29 pada perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa semua anak di

Kabupaten Pesisir Selatan yang berusia 7 – 12 tahun bersekolah di Sekolah Dasar. Sedangkan APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu pada anak laki-laki di Kecamatan Bayang 77,88 persen.

### C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.



Gambar 3.3  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

CATATAN : Data SLTA berada di Propinsi

Gambar 3.3 diatas menunjukkan bahwa Partisipasi Sekolah penduduk Pesisir Selatan usia 7-15 tahun terbanyak masih sekolah. Angka Partisipasi Sekolah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**

Persentase Penduduk Berumur 7 Tahun Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan menurut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	7-12			13-15		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Koto XI Tarusan	3.076	2.919	5.995	1.539	1.576	3.115
2	Bayang	2.306	2.145	4.451	1.124	1.083	2.207
3	IV Nagari Bayang Utara	505	503	1.008	655	654	1.309
4	IV Jurai	3.066	2.777	5.843	1.680	1.476	3.156
5	Batang Kapas	2.033	1.908	3.941	963	903	1.866
6	Sutera	3.304	3.082	6.386	1.354	1.409	2.763
7	Lengayang	3.422	3.117	6.539	1.639	1.661	3.300
8	Ranah Pesisir	1.888	1.805	3.693	1.016	937	1.953
9	Linggo Sari Baganti	2.964	2.840	5.804	1.485	1.339	2.824
10	Airpura	1.163	1.054	2.217	442	401	843
11	Pancung Soal	2.001	1.855	3.856	896	841	1.737
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	877	866	1.743	550	502	1.052
13	Basa Ampek Balai Tapan	1.114	1.050	2.164	373	348	721
14	Lunang	1.397	1.355	2.752	520	597	1.117
15	Silaut	994	952	1.946	345	314	659
	<b>Total</b>	<b>30.110</b>	<b>28.228</b>	<b>58.338</b>	<b>14.582</b>	<b>14.039</b>	<b>28.622</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penduduk Berumur 7 Tahun Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah bahwa persentase penduduk yang masih sekolah tertinggi berada di Kecamatan Lengayang yaitu 3.300 dan terendah di Kecamatan Silaut yaitu 659 persen.

#### **D. Angka Buta Huruf**

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik.

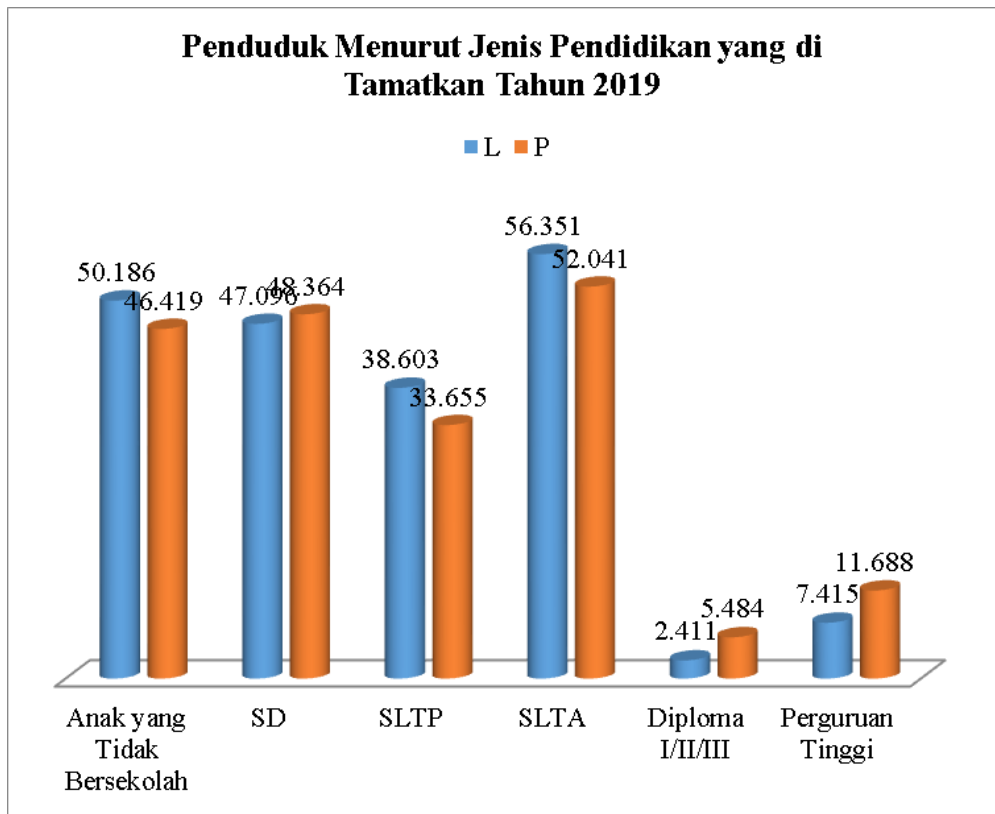
Pada Tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Percepatan Penuntasan Buta Huruf sehingga sampai sekarang tidak adalagi program-program tentang Penuntasan Buta Aksara.

#### **E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu negara.

Pada Gambar 3.5 dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sementara pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, persentase penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Keadaan ini menunjukkan

bahwa pendidikan penduduk perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah setara dengan laki-laki.



Gambar 3.4.

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Sumber : Capil 2020

## **BAB IV**

### **KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup perempuan dapat diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program Keluarga Berencana, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

## A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan *Human Development Index* (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup penduduk Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2015. Pada tahun 2019 Angka Harapan Hidup Pesisir Selatan adalah 70.73. Hal ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 diperkirakan rata-rata akan hidup selama 70 hingga 71 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi kesehatan menurut umur tidak berubah.

## **B. Angka Kematian Ibu**

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. SUPAS 2015 melaporkan sudah terjadi penurunan kematian IBU selama periode 2012-2015 yaitu 305 per 100.000 per Kelahiran Hidup. Profil Kesehatan Sumatera Barat 2017 melaporkan bahwa terjadi penurunan AKI dari 111 per 100.000 Kelahiran Hidup 2015 menjadi 107 per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2017.

Penurunan Angka Kematian Ibu menjadi salah satu target dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 yaitu Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 90 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 20 per 1000 Kelahiran Hidup.

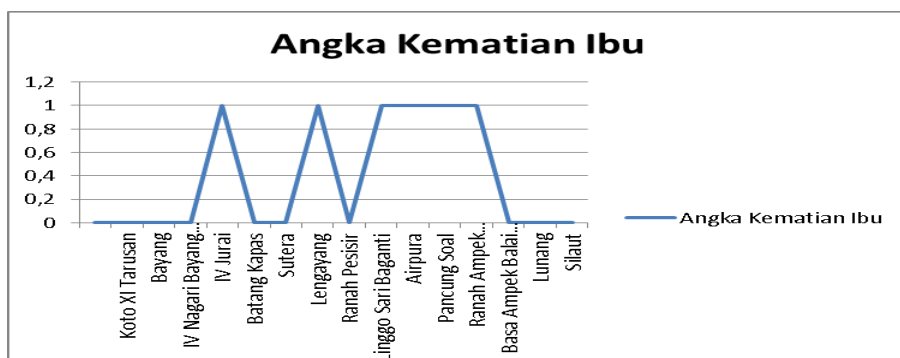
Tabel 4.1  
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan  
di Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1	Koto XI Tarusan	-
2	Bayang	-
3	IV Nagari Bayang Utara	-
4	IV Jurai	1
5	Batang Kapas	-
6	Sutera	-
7	Lengayang	1
8	Ranah Pesisir	-
9	Linggo Sari Baganti	1
10	Airpura	1
11	Pancung Soal	1
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1
13	Basa Ampek Balai Tapan	-
14	Lunang	-
15	Silaut	-
Jumlah		6

Angka Kematian Ibu Melahirkan pada Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019 berjumlah 6 Orang ini merupakan keberhasilan bagi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menekan angka kematian ibu melahirkan.

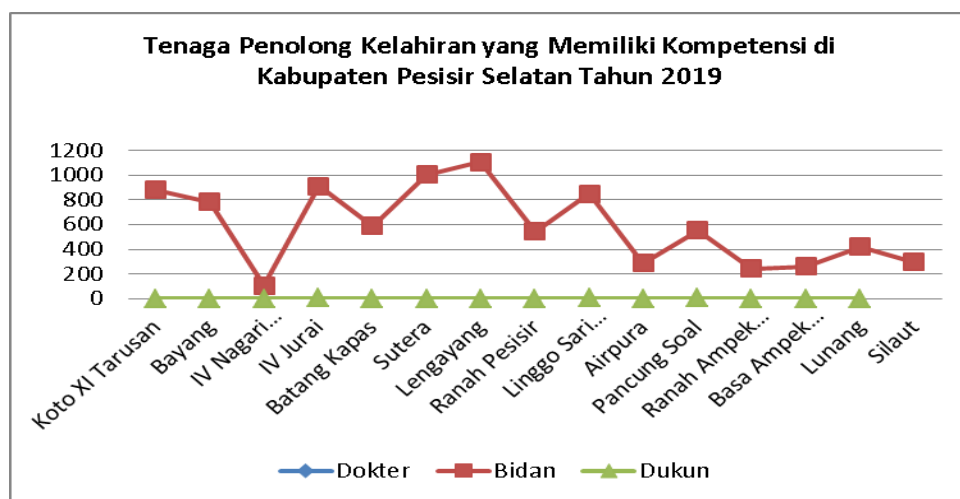
Gambar 4.2

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019



### C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 90 persen. Angka ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada beberapa daerah masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun, tetapi sudah dilakukan pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun di beberapa Kab/Kota, namun masih perlu Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun.



Gambar 4.3

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2020

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di Kabupaten Pesisir Selatan.

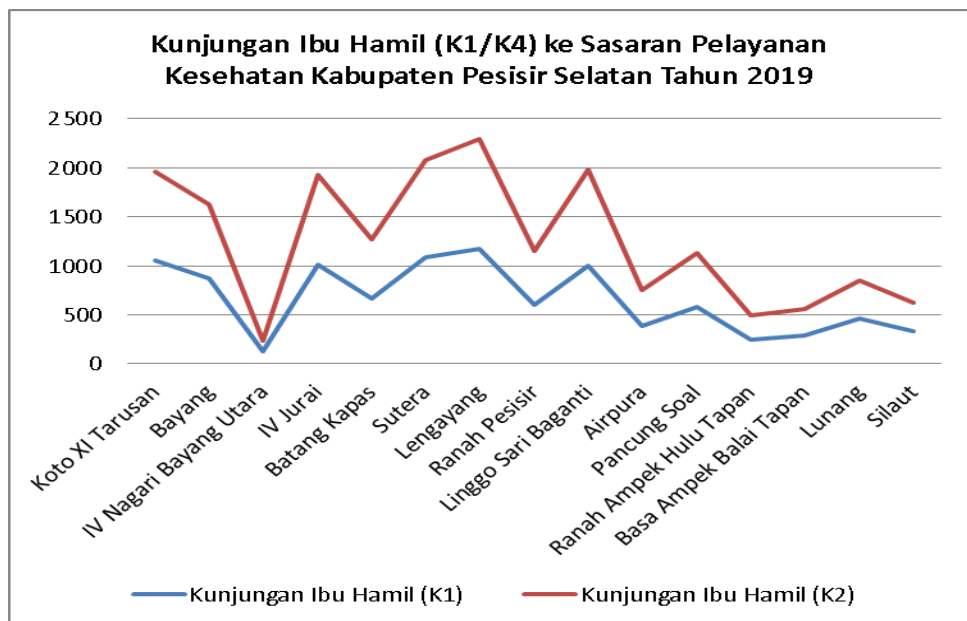
### D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta

kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah melahirkan.

Pencapaian cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) tahun 2019 sebanyak 9893 orang. K4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian satu kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester kedua (>12 -24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan.



**Gambar 4.4** Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1/K4 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Sumber Data : Dinkes 2020

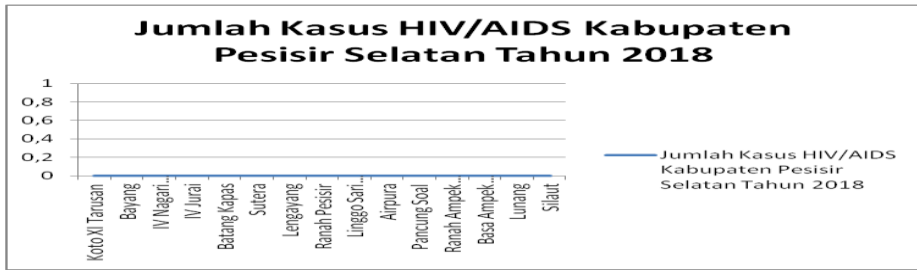
## **E. Penderita HIV/AIDS**

*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

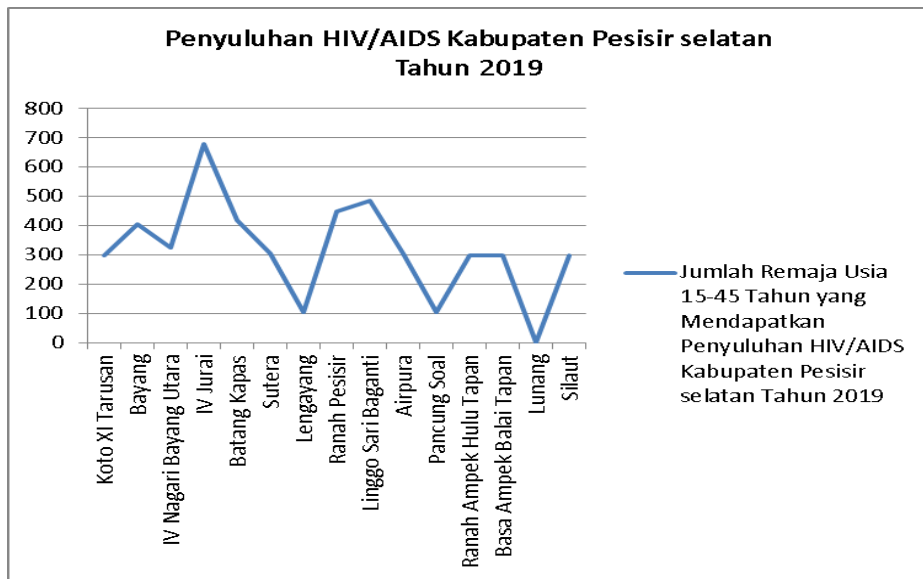
Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun masih tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual; disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfusi, suntikan, tindakan medis, dan lain-lain) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 propinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1994) dilaporkan penderita AIDS berjumlah 55 orang.

Data HIV di Kabupaten Pesisir Selatan dari seksi pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan tidak ada dapat dilihat Perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Pesisir Selatan pada gambar 4.5 berikut ini:



Gambar 4.6  
Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan HIV/AIDS tahun 2019



Sumber Data : Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2020

Gambar di atas menunjukkan tren kasus HIV/AIDS di Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada, dimana Kabupaten Pesisir Selatan sering melakukan penyuluhan tentang kesehatan HIV/AIDS . dimana Kecamatan yang sering dilakukan terdapat pada Kecamatan IV Jurai.

## F. Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an.

Program Keluarga Berencana lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui Keluarga Berencana perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera.

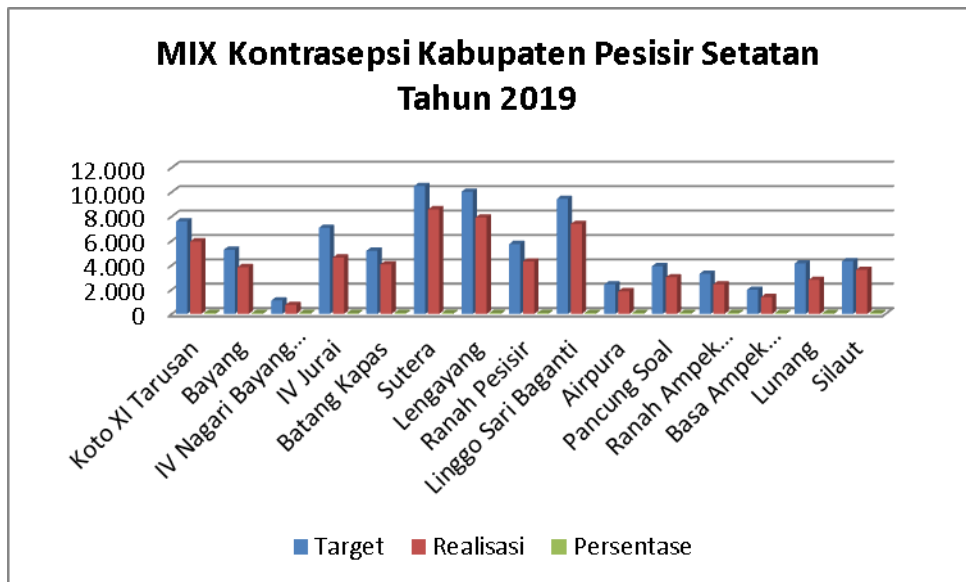
**Tabel 4.2**  
Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan (orang), 2019

Kecamatan	Akseptor KB		Presentase
	Target	Realisasi	
Koto XI Tarusan	7.582	5.938	78,32
Bayang	5.254	3.828	66,30
IV Nagari Bayang Utara	1.098	728	66,30
IV Jurai	7.061	4.617	65,39
Batang Kapas	5.178	4.055	78,31
Sutera	10.478	8.571	81,80
Lengayang	10.016	7.892	78,79
Ranah Pesisir	5.727	4.298	75,05
Linggo Sari Baganti	9.425	7.368	78,18
Airpura	2.419	1.858	76,81
Pancung Soal	3.908	2.998	76,71
Ranah Ampek Hulu Tapan	3.282	2.430	74,04
Basa Ampek Balai Tapan	1.978	1.381	69,82
Lunang	4.141	2.788	67,33
Silaut	4.322	3.612	83,57
Jumlah	81.869	62.362	76,17

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan (orang), Target 81.869 Realisasi 62.362 dan Presentase 76,17

Gambar 4.7 Jumlah Target dan Realisasi Penduduk yang

memakai Alat KB Tahun 2019.



### G. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan.

Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang.

**Tabel 4.3**

Jumlah Pernikahan, Talak dan Cerai Menurut Kecamatan  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

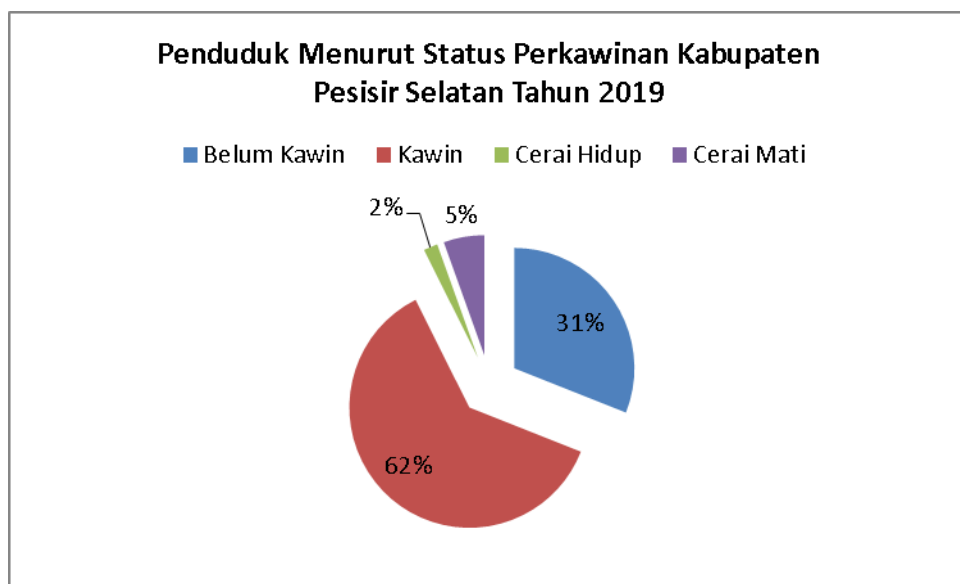
Kecamatan	Jumlah				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hudup	Cerai Mati	Jumlah
Koto XI Tarusan	3,6	6,1	0,2	0,6	10,6
Bayang	2,7	5,1	0,2	0,6	8,6
IV Nagari Bayang Utara	0,6	1,0	0,0	0,2	1,7
IV Jurai	3,0	6,4	0,2	0,6	10,2
Batang Kapas	2,4	4,4	0,1	0,5	7,4
Sutera	3,5	6,8	0,2	0,6	11,1
Lengayang	3,9	7,6	0,2	0,7	12,5
Ranah Pesisir	2,0	4,3	0,1	0,4	6,9
Linggo Sari Baganti	2,9	6,2	0,2	0,4	9,7
Airpura	1,1	2,1	0,1	0,1	3,4
Pancung Soal	1,6	3,0	0,1	0,2	4,8
Ranah Ampek Hulu Tapan	0,9	1,8	0,1	0,1	2,9
Basa Ampek Balai Tapan	0,9	1,9	0,1	0,2	3,0
Lunang	1,1	2,8	0,1	0,2	4,2
Silaut	0,7	2,1	0,0	0,1	2,9
Pesisir Selatan	31,0	61,6	1,9	5,5	100,0

Tabel 4.2, menyajikan komposisi penduduk menurut Jumlah Pernikahan, Talak dan Cerai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh Penduduk berstatus Kawin yakni 61,6 Hal ini terlihat, baik untuk penduduk laki-laki yang berstatus kawin hampir sama dengan perempuan. Sementara, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga harus membiayai kebutuhan keluarga,

mempunyai keinginan maupun secara ekonomi belum memasuki kehidupan rumah tangga.

Gambar 4.8

Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2019



Sumber Data : Catatan Sipil Kab Pessel 2020

Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal disebabkan meninggal istrinya lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi.

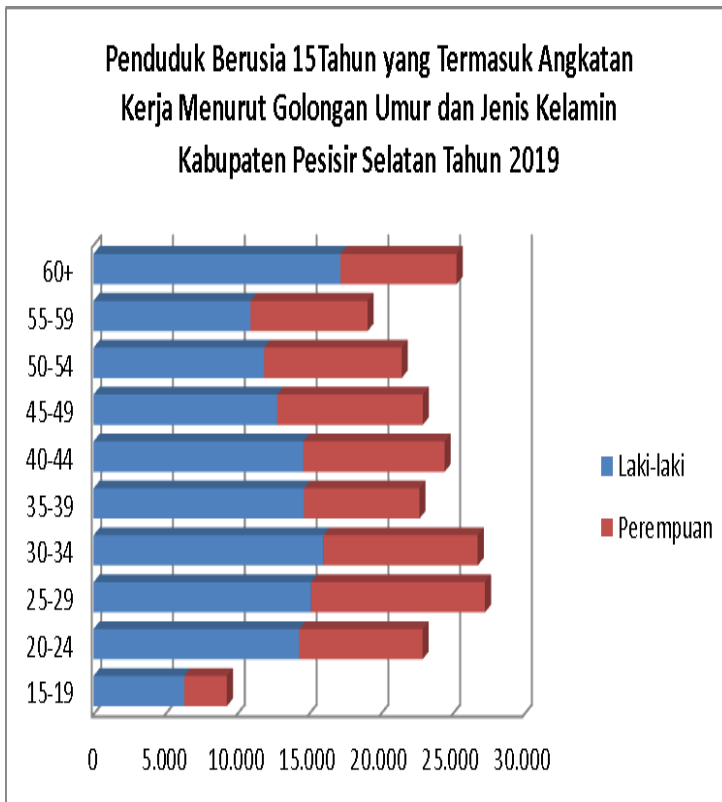
## **BAB V**

### **KETENAGAKERJAAN**

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

#### **A. Penduduk Usia Kerja**

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun keatas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.



Gambar 5.1

Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka 2020

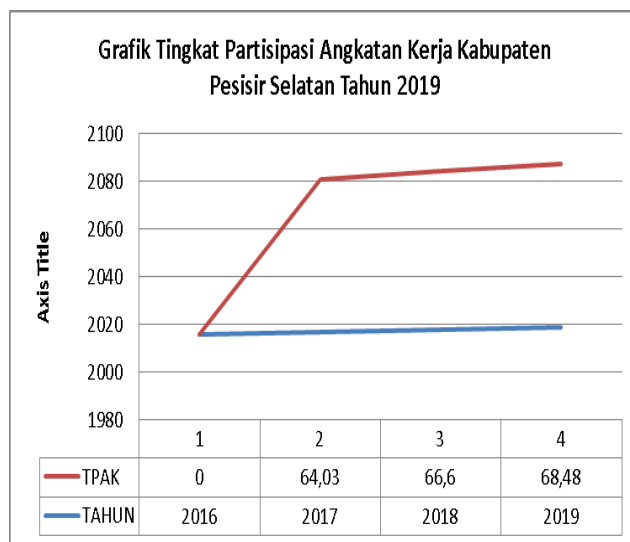
Dimana defienisi dari bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi

Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Kabupaten Pesisir Selatan terbesar pada kelompok usia 25 – 29 tahun, yaitu laki-laki sebesar 55,56 persen dan perempuan sebesar 44,44 persen.

## B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Gambar 5.2 menunjukkan TPAK Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019.

Tahun 2019, TPAK Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan menjadi 68,48 persen dari tahun sebelumnya 66,60 persen.



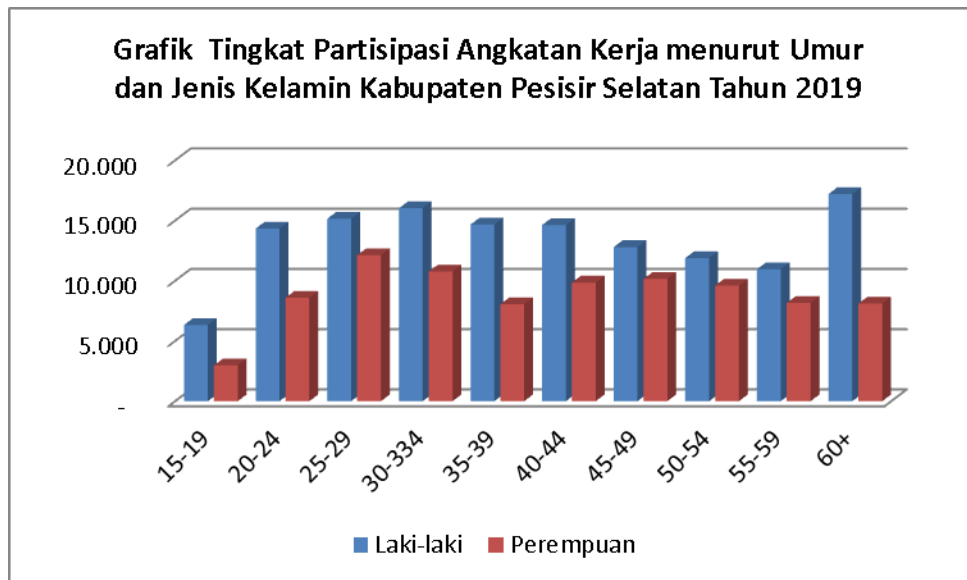
Gambar 5.2  
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Sumber Data :  
PSDA Tahun 2020

Ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan adalah TPAK bagi perempuan. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

pada Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pada semua kelompok umur, TPAK laki-laki lebih besar dari pada perempuan. TPAK laki-laki sangat tinggi pada kisaran usia 30 – 19 tahun dengan jumlah mencapai 43, persen. Sementara TPAK perempuan mencapai puncak pada kelompok umur 45 – 54

tahun sebesar 57,4 persen.



Gambar 5.3

Grafik tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

### C. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk juga pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

**Tabel 5.1**  
**Angkatan Kerja (Orang) Menurut Usia Kerja**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

No.	Kelompok Umur	Angkatan Kerja		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	15-19	6.331	2.964	9.295
2	20-24	14.336	8.590	22.926
3	25-29	15.154	12.122	27.276
4	30-34	16.016	10.751	26.767
5	35-39	14.664	8.047	22.711
6	40-44	14.620	9.845	24.465
7	45-49	12.796	10.150	22.946
8	50-54	11.884	9.595	21.479
9	55-59	10.946	8.152	19.098
10	60+	17.199	8.102	25.301
Pesisir Selatan		133.946	88.318	222.264

*Sumber Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2019*

Dari tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa penduduk bekerja terbanyak berusia 25-30 tahun yaitu 27.276 orang.

#### **D. Status Pekerjaan**

Status pekerjaan utama penduduk Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:

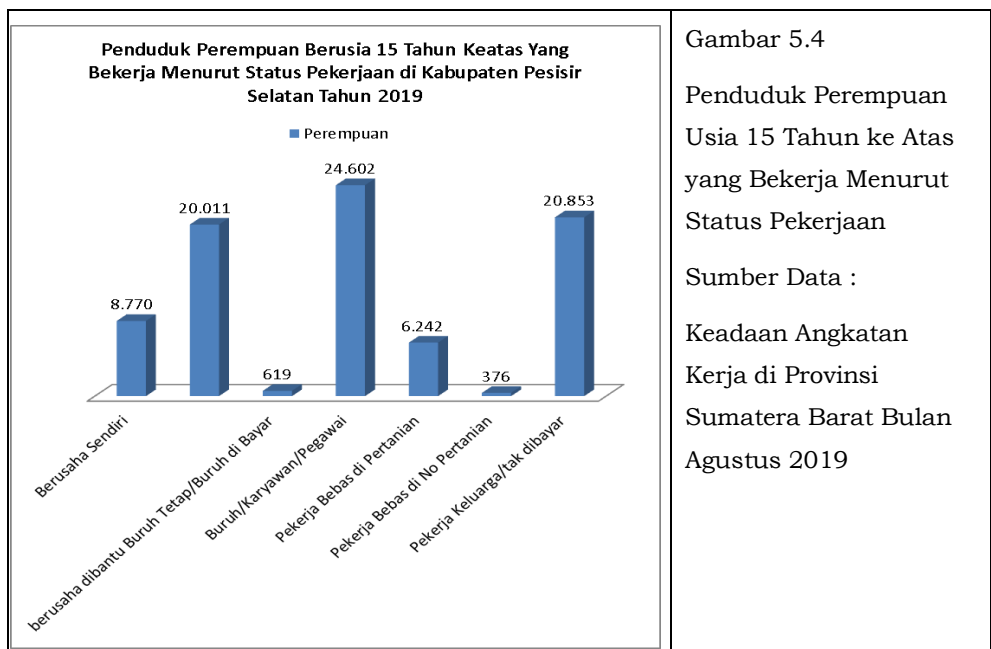
**Tabel 5.2**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status**  
**Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

Status Pekerjaan Utama	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
Berusaha Sendiri	8.770	25.112	33.882
Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/buruh Tak dibayar	20.011	29.754	49.765
berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh di Bayar	619	10.284	10.903
Buruh/Karyawan/Pegawai	24.602	36.518	61.120
Pekerja Bebas di Pertanian	6.242	10.216	16.458

Pekerja Bebas di No Pertanian	376	5.855	6.231
Pekerja Keluarga/tak dibayar	20.853	10.065	30.918
Jumlah	81.473	127.804	209.277

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Prov. Sumbar Keadaan Agustus 2019

Jika dilihat dari status pekerjaan pada Gambar 5.4, penduduk perempuan Pesisir Selatan yang berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak adalah berstatus sebagai Buruh/Kariawan/Pegawai yaitu 24.602, Sementara itu, Pekerja Bebas di Non Pertanian menempati posisi paling rendah yaitu sebesar 376.



Gambar 5.4

Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Sumber Data :

Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat Bulan Agustus 2019

## **BAB VI**

### **PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK**

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestik, peran perempuan juga telah diakui di sektor publik

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan pun perempuan sudah dapat membuktikan bahwa dirinya mampu dalam memimpin suatu gerakan dalam melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam pergerakan nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat, hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

#### **A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif**

Peningkatan jumlah perempuan terpelah tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi

perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam Lembaga Legislatif masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas pada pemilu di Indonesia adalah perempuan, hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu periode 2014 – 2019, dimana perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 orang dari 45 orang jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (6,67 persen).

**Tabel 6.1**  
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Kabupaten Pesisir Selatan  
 Periode 2014 – 2019

No	Nama	Jabatan	Partai	Fraksi	Badan
1	Fetmadarni	Komisi III	PDI	PDI	Anggota Bamus
2	Emidalti, SE	Komisi III	HANURA	HANURA	Anggota Bamus
3	Sri Kumala Sewi	Komisi IV	PDI	PDI	Anggpta Banggar

*Sumber: Website DPRD Kabupaten Pesisir Selatan*

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan perempuan sebanyak 3 orang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 Orang dan 1 orang dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Dari ketiga orang tersebut tidak ada satupun yang menjadi pimpinan DPRD maupun ketua Komisi.

Tabel 6.2  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Periode 2014 – 2019

No	Partai	Anggota DPRD		Persen
		Laki-Laki	Perempuan	
1	GOLKAR	6	1	13,33
2	GERINDRA	5	-	11,11
3	NASDEM	5	-	11,11
4	PAN	5	-	11,11
5	HANURA	4	-	11,11
6	PKS	5	-	11,11
7	DEMOKRAT	5	-	11,11
8	PPP	4	-	8,89
9	PDIP	2	2	4,45
10	PBB	2	-	4,45
11	PKB	1	-	2,22
	Jumlah	42	3	100

Sumber: SPDA Tahun 2020

Tabel tabel 6.2 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan ada 3 Orang anggota legislatif perempuan. Persentase anggota legislatif perempuan pada Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 6,67 persen.

## B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang besar untuk jabatan politik yang penting di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang Presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki dan perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.

**Tabel 6.3**

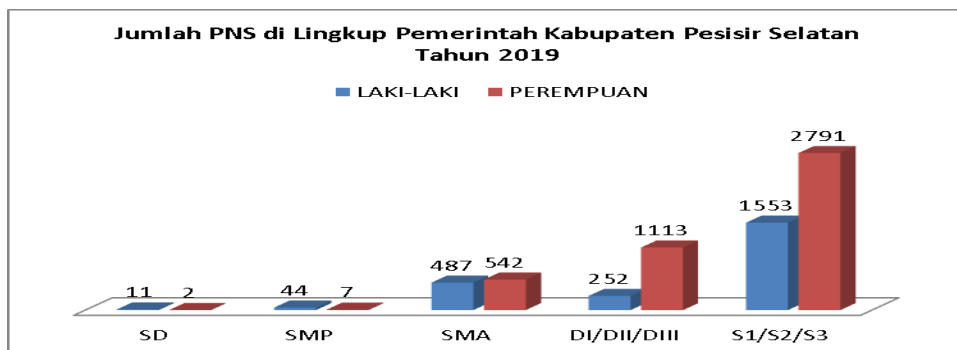
Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

<b>golongan</b>	<b>laki-laki</b>	<b>perempuan</b>	<b>jumlah</b>
<b>I</b>	22	8	30
<b>II</b>	383	605	988
<b>III</b>	1121	2422	3543
<b>IV</b>	822	1429	2241
<b>Jumlah</b>	2348	4454	6802

*Sumber: BKDSDM Kabupaten Pesisir Selatan 2020*

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 pada tabel 6.3, pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 6802 orang, yang terdiri atas 2348 orang laki-laki dan 4454 orang perempuan. PNS Perempuan terbanyak berada pada Golongan III yaitu 2422 orang, dan terendah pada Golongan I yaitu sebanyak 8 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.1 di bawah ini.

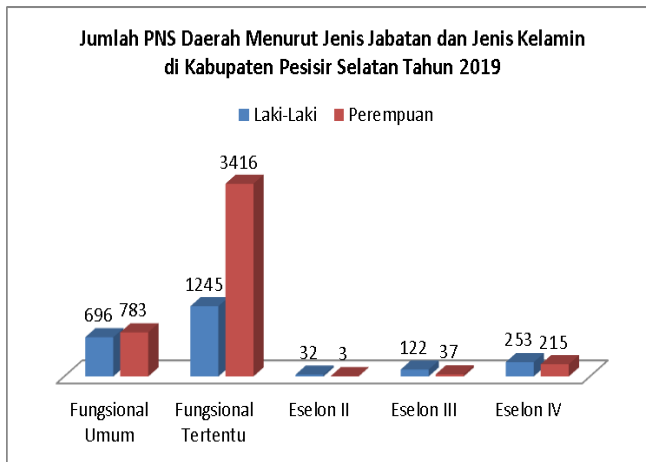


Gambar 6.1

Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada jumlah PNS laki-laki yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada jenjang pendidikan SLTA, D2 sampai S1 jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.



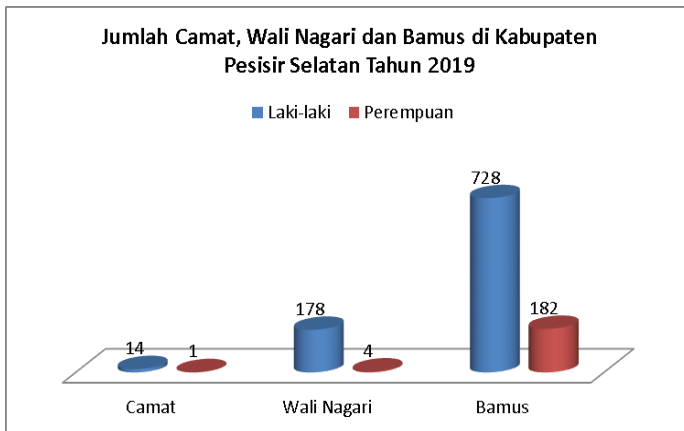
Gambar 6.2  
Jumlah Pejabat  
Struktural Kabupaten  
Pesisir Selatan Tahun  
2019

Sumber :  
*BKDSDM Pessel 2020*

Jumlah pejabat struktural di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 656 orang, 243 jabatan diantaranya ditempati oleh perempuan.

Gambar 6.2 menunjukkan Pejabat struktural laki-laki terbanyak menduduki posisi eselon IV, yakni 253 jabatan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pejabat struktural perempuan, yakni menempati 215 posisi, terdiri dari 32 orang Eselon II, 122 Orang Eselon III.

Gambar 6.3 berikut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi camat, walinagari/kepala desa/lurah jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jumlah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan 15 Kecamatan dimana camat laki - laki 14 orang untuk camat perempuan 1 Orang, dan walinagari berjumlah 182 Nagari dengan Wali Nagari laki - laki berjumlah 178 dan wali nagari perempuan 4 orang untuk Bamus laki-laki berjumlah 728 orang dan perempuan 182 orang.



Gambar 6.3

Jumlah Camat, Wali Nagari, Bamus Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

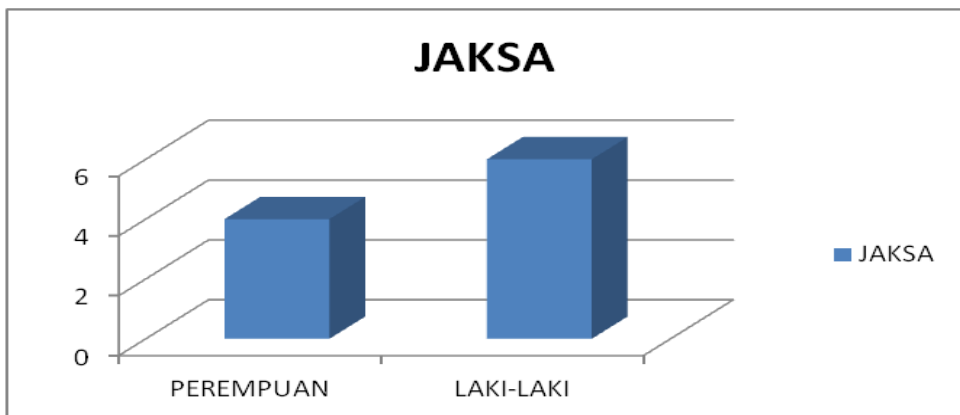
Sumber : DPMDPPKB Pessel 2020

### C. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat misalnya pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga- lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

Salah satu di antaranya adalah lembaga kejaksaan. Representasi

perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan yang menjadi jaksa.

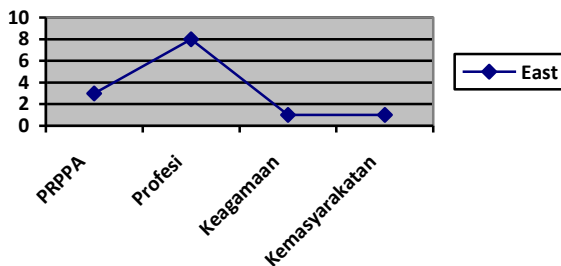


Data tabel 6.4 menunjukkan bahwa jumlah jaksa perempuan relatif sedikit dibandingkan dengan jaksa laki-laki. Hal ini akan berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender jaksa khususnya dan para penegak hukum lainnya seperti hakim dan polisi masih relatif rendah. Oleh karena itu, tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena keperempuanannya kurang diperhatikan secara optimal.

#### D. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.



Gambar 6.5

Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Sumber: DSPRPPA Kab. Pessel

Tahun 2019 terdapat 3 organisasi perempuan yang dibiayai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 3 Organisasi Darma Wanita Persatuan (DWP), Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten (BKMT) dan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten (GOW).

## **BAB VII**

### **HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA**

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

## A. Penghuni Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

Tabel 7.1 berikut ini menyajikan data tahanan dan narapidana dan lapas berdasarkan lama hukuman dan jenis kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

**Tabel 7.1**

Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

UPT Kemasyarakatan	hukuman 1 tahun keatas		hukuman 1 tahun kebawah	
	L	P	L	P
<b>Rutan Kelas II B Painan</b>	112	3	-	-
<b>Total</b>	112	3	-	-

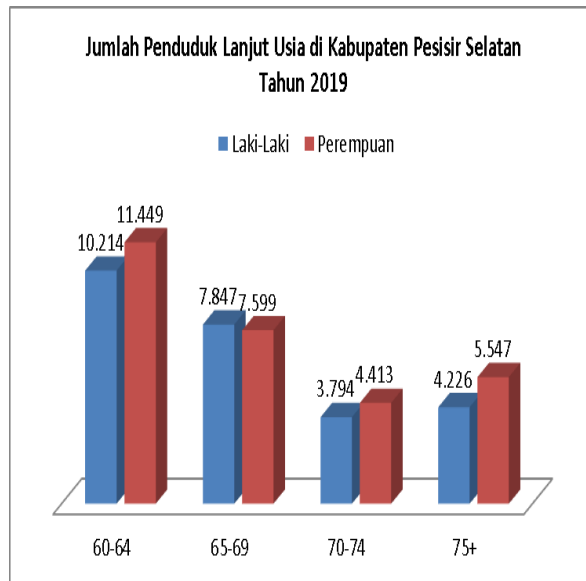
*Sumber: RTNKLAS II B PAINAN 2019*

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 112 orang laki-laki dan 4 orang perempuan penghuni lapas dengan lama masa hukuman 1 tahun keatas.

## B. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Gambar 7.1 menunjukkan jumlah lansia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah 55.089 jiwa, terdiri dari 26.081 lansia laki-laki dan 29.008 lansia perempuan.



**Gambar 7.1**

Jumlah Penduduk lanjut usia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### C. Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

**Tabel 7.3**

Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	penyandang disabilitas	
		L	P
1	Koto XI Tarusan	203	224
2	Bayang	135	115
3	Bayang Utara	1	0
4	IV Jurai	131	112
5	Batang Kapas	2	4
6	Sutera	16	7
7	Lengayang	12	12
8	Ranah Pesisir	29	23
9	Linggo Sari Baganti	4	0
10	Pancng Soal	9	5
11	Air Pura	25	14
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	8	3
13	Basa Ampek Balai Tapan	4	5
14	Lunang	20	20
15	Silaut	5	3
	Jumlah	304	540

Sumber: Data BDT Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pessel 2019

#### D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18 – 59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang/tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama. Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali.

Tabel 7.4 menunjukkan bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 berjumlah 6.453 orang.

**Tabel 7.4**

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kabupaten di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
Koto XI Tarusan	895
Bayang	629
IV Nagari Bayang Utara	238
IV Jurai	699
Batang Kapas	53
Sutera	99
Lengayang	129
Ranah Pesisir	158
Linggo Sari Baganti	173
Airpura	182
Pancung Soal	264

Ranah Ampek Hulu Tapan	17
Basa Ampek Balai Tapan	18
Lunang	134
Silaut	37
Jumlah	3.725

Sumber: DTKS Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pessel Tahun 2019

Tabel 7.4 menunjukkan perempuan rawan sosial ekonomi terbanyak berada di Kecamatan Koto XI Tarusan , yaitu sebanyak 895 orang. Sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, yaitu sebanyak 17 orang.

### **E. Perempuan Kepala Rumah Tangga**

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering dicampurkan dengan keluarga. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi rumah tangga pada bab ini adalah seseorang atau sekelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk seseorang yang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seseorang/penduduk berumur 10 tahun ke atas dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari pada rumah tangga tersebut atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Pada umumnya yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki. Namun demikian, bukan berarti perempuan tidak ada yang menjadi kepala rumah tangga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat. Data pada tabel 7.5 menunjukkan bahwa yang

menjadi kepala rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki (83,26 persen), terutama pada rumah tangga yang anggotanya masih lengkap sehingga perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga lebih berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga.

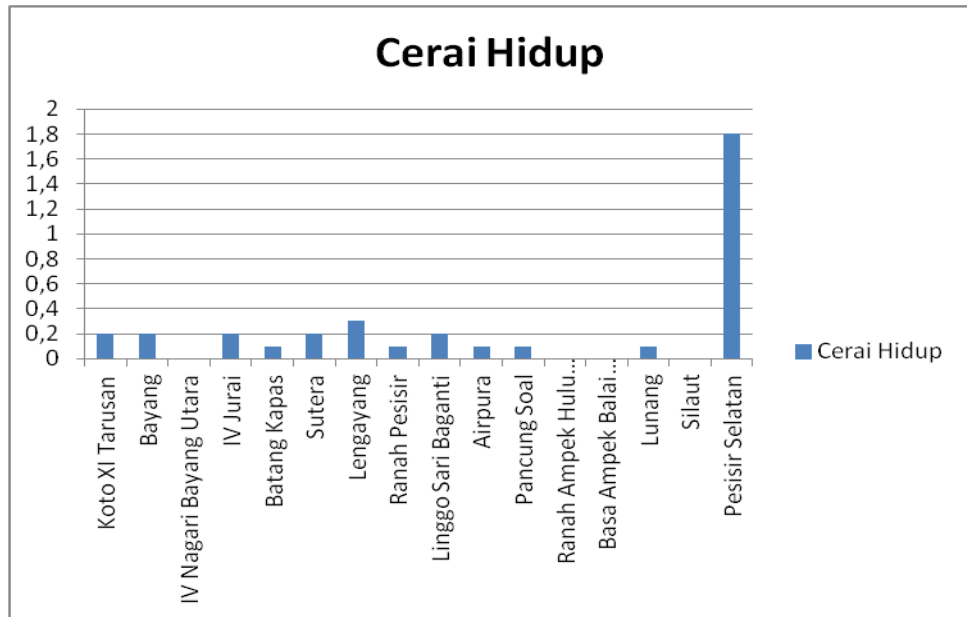
**Tabel 7.5**  
 Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten  
 di Kabupaten Pesisir Selatan  
 Tahun 2019

NO	KECAMATAN	L	(%)	P	%
1	KOTO XI TARUSAN	11,742	8,3	2,582	1,8
2	BAYANG	9,797	6,9	2,336	1,7
3	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.002	1,4	547	0,4
4	IV JURAI	12.250	8,7	2.236	1,6
5	BATANG KAPAS	8,477	6,0	1,969	1,4
6	SUTERA	12,869	9,1	2,407	1,7
7	LENGAYANG	14.661	10,4	3.163	2,2
8	RANAH PESISIR	8.284	5,9	1,891	1,3
9	LINGGO SARI BAGANTI	11.632	8,2	2.141	1,5
10	AIR PURA	4.102	2,9	699	0,5
11	PANCUNG SOAL	5.651	4,0	993	0,7
12	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,489	2,5	514	0,4
13	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3.548	2,5	665	0,5
14	LUNANG	5.490	3,9	699	0,5
15	SILAUT	4.122	2,9	368	0,3
	KABUPATEN PESISIR SELATAN	118.116	83,6	23.138	16,4

Perempuan sebagai Kepala Keluarga atau Kepala rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 23.138 KK dari jumlah KK termasuk laki-laki adalah 118.116 KK, perempuan terbanyak berada di Kecamatan Lengayang, yaitu sebanyak 3.163 KK (2,2 persen). Sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Silaut, yaitu sebanyak 368 KK (0,3 persen).

Gambar 7.2

Jumlah Perkara yang Cerai Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019



Perkara cerai gugat jauh lebih tinggi dari pada cerai talak, hal ini menunjukkan banyaknya pihak istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tingginya kasus perceraian tentunya akan meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga.

## **BAB VIII**

### **KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Tumbuh Kembang Anak**

##### **1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal**

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu: perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam dua jalur pendidikan, yaitu formal dan nonformal. Jenis-jenis PAUD formal di antaranya: Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal. Sedangkan PAUD nonformal di antaranya: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

**Tabel 8.1**

Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal Menurut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

No	KECAMATAN	TK	TPA	KB	SPS	TOTAL
1	Koto XI Tarusan	380	0	589	115	1.084
2	Bayang	398	0	669	149	1.216
3	IV Nagari Bayang Utara	68	0	217	0	285
4	IV Jurai	202	14	756	20	992
5	Batang Kapas	115	0	311	0	495
6	Sutera	316	0	274	60	491
7	Lengayang	634	0	644	0	1.278
8	Ranah Pesisir	398	0	148	0	546
9	Linggo Sari Baganti	623	0	247	0	870
10	Airpura	339	0	238	55	632
11	Pancung Soal	545	0	189	13	747
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	58	0	351	0	409
13	Basa Ampek Balai Tapan	220	0	213	0	433
14	Lunang	434	0	181	0	615
15	Silaut	345	0	146	0	491
	Pesisir Selatan	5.074	14	5.173	413	21.168

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Pessel Tahun 2019

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa peserta PAUD di Kabupaten Pesisir Selatan terbanyak pada jalur format Kelas Bermain (KB) yaitu sebanyak 5.173 orang, sedangkan peseta PAUD terbanyak pada Kecamatan IV Jurai 1.243 orang dan terendah pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebanyak 285 orang.

## 2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal

Lembaga/Kelompok PAUD di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersaji pada tabel 8.2, terbanyak adalah jalur formal Kelas Bermain sebanyak 182 lembaga, dan yang terendah adalah jalur non formal Tempat Penitipan Anak (TPA) sebanyak 4 lembaga. Lembaga/kelompok PAUD terbanyak berada di Kecamatan IV Jurai, yaitu sebanyak 25 lembaga.

**Tabel 8.2**  
**Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**Non Formal Berdasarkan Kabupaten**  
**Kabupaten Pesisir Selatan 2019**

No	KECAMATAN	TK	TPA	KB	SPS	TOTAL
1	Koto XI Tarusan	9	0	21	2	30
2	Bayang	9	0	17	4	32
3	IV Nagari Bayang Utara	3	0	10	0	13
4	IV Jurai	6	1	25	1	33
5	Batang Kapas	3	0	10	4	17
6	Sutera	7	0	9	1	17
7	Lengayang	15	0	20	0	35
8	Ranah Pesisir	10	0	9	0	19
9	Linggo Sari Baganti	17	0	19	0	26
10	Airpura	11	0	7	2	20
11	Pancung Soal	13	0	8	1	22
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1	0	10	0	11
13	Basa Ampek Balai Tapan	7	0	7	0	14
14	Lunang	13	0	6	0	19
15	Silaut	8	0	4	0	12
	Pesisir Selatan	132	1	182	15	320

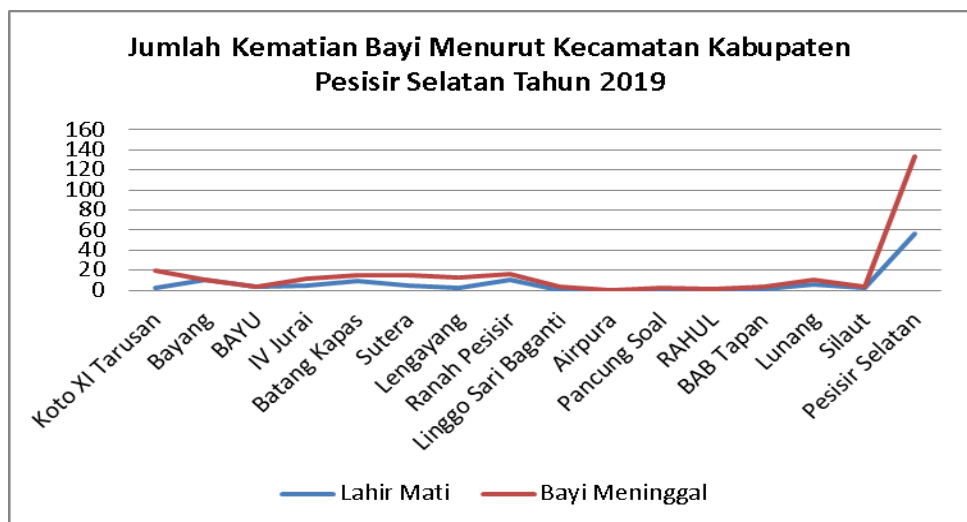
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel Tahun 2019

## B. Kelangsungan Hidup Anak

### 1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi kelahiran infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malnutrisi.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.



Gambar 8.1

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019  
Sumber : PSDA Kab. Pessel Tahun 2020

Tabel 8.3 menunjukkan Jumlah Kematian Bayi usia 0 – 12 hari tertinggi terdapat di Kecamatan Kecamatan Koto XI Tarusan (20 kematian), dan terendah di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (1 kematian).

Tabel 8.3  
Jumlah Kematian Bayi menurut Kecamatan  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

KECAMATAN	Lahir Mati	Bayi Meninggal
Koto XI Tarusan	2	18
Bayang	10	4
BAYU	3	3
IV Jurai	5	6
Batang Kapas	9	6
Sutera	5	10
Lengayang	2	11
Ranah Pesisir	10	6
Linggo Sari Baganti	0	3
Airpura	0	0
Pancung Soal	0	2
RAHUL	1	0
BAB Tapan	1	3
Lunang	6	4
Silaut	2	2
Pesisir Selatan	56	78

*Sumber : PSDA Tahun 2019*

## 2. Angka Kematian Balita (AKBA)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Jumlah kematian balita di Kecamatan Pesisir Selatan

mengalami penurunan dari tahun yang lalu.

Tabel 8.4

Jumlah Kematian Belita Menurut Kecamatan  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

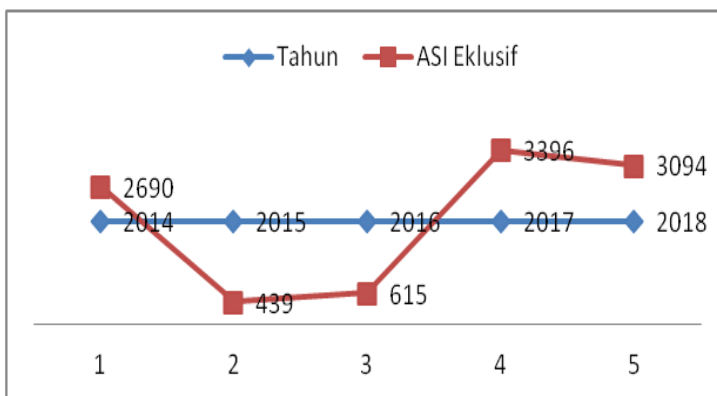
Kecamatan	Perempuan	Laki-laki
Koto XI Tarusan	6	13
Bayang	1	3
BAYU	1	2
IV Jurai	2	4
Batang Kapas	4	4
Sutera	5	6
Lengayang	4	9
Ranah Pesisir	2	5
Linggo Sari Baganti	0	3
Airpura	0	0
Pancung Soal	1	1
RAHUL	0	0
BAB Tapan	0	3
Lunang	1	3
Silaut	0	2
Pesisir Selatan	27	58

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

### 3. Pemberian Air Susu Ibu

ASI eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) sendiri mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lainnya, walaupun hanya air putih. Setiap bayi berhak untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.



Gambar 8.2

Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pessel 2018

Tabel 8.5

## ASI Eksklusif

Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
Koto XI Tarusan	291	7	413	426	263
Bayang	292	70	346	205	425
IV Nagari Bayang Utara	42	4	65	74	31
IV Jurai	327	88	483	560	351
Batang Kapas	232	20	245	334	165
Sutera	356	23	174	164	800
Lengayang	351	139	477	198	501
Ranah Pesisir	201	14	235	110	213
Linggo Sari Baganti	298	185	247	160	475
Airpura	0	0	0	0	203
Pancung Soal	312	3	182	409	359
Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0	0	0	149
BAB Tapan	191	14	281	215	294
Lunang	153	45	112	130	240
Silaut	95	3	136	109	139
Pesisir Selatan	5156	615	3396	3094	4608

Tabel 8.5 menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan ASI Eksklusif mengalami peningkatan dari tahun 2016 hanya 615 anak yang mendapatkan ASI Eksklusif dan pada tahun 2019 sudah 4.608 anak yang mendapatkan ASI Eksklusif pada Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 4. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Tabel 8.7 menunjukkan bahwa baru sekitar 98,52 persen anak yang memiliki dan dapat menunjukkan akta kelahiran, dan 1,48 persen anak belum memiliki akta kelahiran tersebut.

**Tabel 8.6**  
 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kecamatan dan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

KECAMATAN	PENDUDUK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	( % )
PANCUNG SOAL	4.622	4.266	8.888	5,49
RANAH PESISIR	5.166	4.802	9.968	6,16
LENGAYANG	9.648	8.942	18.590	11,49
BATANG KAPAS	6.237	5.646	11.883	7,35
IV JURAI	8.426	7.633	16.059	9,93
BAYANG	6.902	6.273	13.175	8,14
KOTO XI TARUSAN	8.673	8.130	16.803	10,39
SUTERA	9.801	9.134	18.935	11,70
LINGGO SARI BAGANTI	8.223	7.534	15.757	9,74
LUNANG	3.697	3.559	7.256	4,49
BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.689	2.602	5.291	3,27
IV NAGARI BAYANG UTARA	1.286	1.287	2.573	1,59
AIRPURA	3.312	3.019	6.331	3,91
RANAH AMPEK HULU TAPAN	2.774	2.483	5.257	3,25
SILAUT	2.568	2.435	5.003	3,25
PESISIR SELATAN	84.024	77.745	161.769	100

## **C. Perlindungan Anak**

### **1. Anak Jalanan**

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

Dari Data PMKS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 sampai saat ini anak Jalanan di Kabupaten Pesisir Selatan Tidak Ada.

### **2. Pekerja Anak**

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak di bawah 15 tahun. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali pada pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, dengan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

### **3. Anak Terlantar**

Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak

tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh Negara untuk tahun 2018 Anak Terlantar pada Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada.

#### **4. Anak Bermasalah Hukum**

Anak bermasalah dengan hukum (ABH) adalah setiap perbuatan atau tindakan seorang anak di bawah usia dewasa, biasanya 18 tahun, yang terlibat melawan hukum. Jenis-jenis atau macam- macam anak bermasalah hukum (ABH) beragam, mulai dari kasus pencurian, kekerasan seksual, penganiayaan, perkelahian, lakalantas hingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

**Tabel 8.7**  
Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten  
Pesisir Selatan Tahun 2019

Kecamatan	anak sebagai pelaku	anak sebagai korban
Koto XI Tarusan	1	6
Bayang	3	10
IV Nagari Bayang Utara	0	2
IV Jurai	6	9
Batang Kapas	1	4
Sutera	0	4
Lengayang	0	4
Ranah Pesisir	0	2
Linggo Sari Baganti	3	6
Airpura	0	2
Pancung Soal	0	2
Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0
Basa Ampek Balai Tapan	0	1
Lunang	0	2
Silaut	1	0
<b>Jumlah</b>	15	54

Tabel 8.7 menunjukkan bahwa terdapat 15 orang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB IX**

### **KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15a menyatakan: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara Konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Disamping itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminations Against Woman) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara tegas Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, pembantu rumah tangga, maupun sebagai anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

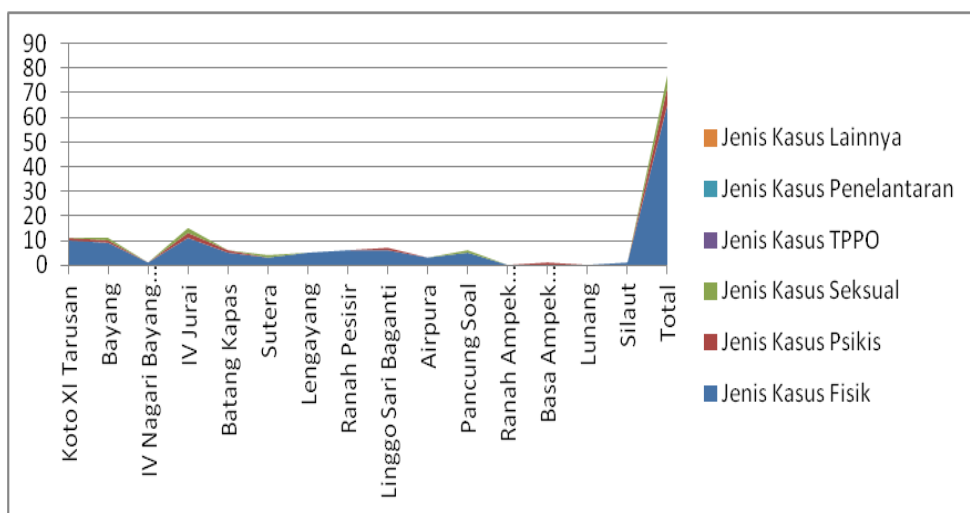
#### **A. Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan yang berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Sampai saat ini kekerasan masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh orang lain (aib keluarga). Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk apabila pelakunya adalah suami mereka sendiri. Namun sesuai dengan perkembangan dan dengan diadakannya

*Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2020*

sosialisasi anti kekerasan terhadap masyarakat dan anak-anak disekolah sehingga kasus ini mulai terkuak dan bermunculan serta dilaporkan baik ke P2TP2A maupun ke Pihak Kepolisian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data dibawah ini:

Gambar 9.1  
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019



Gambar 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (88,63 %), Psikis (2,27 %). dan yang terendah adalah Seksual (9,09 %),

Tabel 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kasus terbanyak terjadi di Kecamatan XI Tarusan yaitu sebanyak 8 kasus, terdiri dari 39 kasus kekerasan fisik dan 4 kasus kekerasan seksual dan 1 kasus Psikis. Dan kasus yang paling sedikit terjadi di Kecamatan Silaut, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, dan Pancung Soal yaitu 0 kasus kekerasan fisik.

**Tabel 9.1**  
**Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan**  
**Di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan				Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Lainnya	
1	Koto XI Tarusan	7	-	1	-	8
2	Bayang	4	-	1	-	5
3	IV Nagari Bayang Utara	1	-	-	-	1
4	IV Jurai	5	1	-	-	6
5	Batang Kapas	2	-	-	-	2
6	Sutera	4	-	-	-	4
7	Lengayang	6	-	-	-	6
8	Ranah Pesisir	3	-	-	-	3
9	Linggo Sari Baganti	6	-	-	-	6
10	Airpura	1	-	-	-	1
11	Pancung Soal	-	-	-	-	0
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	-	0
13	Basa Ampek Balai Tapan	-	-	-	-	0
14	Lunang	-	-	2	-	2
15	Silaut	0	-	-	-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>44</b>

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi didalam keluarga biasanya sang istri dan anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui umum.

Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih korban merasa terancam jiwanya sehingga ia tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku,

termasuk apabila pelakunya adalah suami mereka sendiri.

## B. Kekerasan Terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perilaku yang tidak manusiawi.

Gambar 9.3 menunjukkan bahwa kekerasan yang terhadap anak terbanyak berupa kekerasan Fisik (53,70 persen), diikuti kekerasan Seksual (46,30 persen).

**Tabel 9.3**

Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Fisik	Seksual
1	2	3	4
1	Koto XI Tarusan	3	4
2	Bayang	7	1
3	IV Nagari Bayang Utara	0	2
4	IV Jurai	6	3
5	Batang Kapas	3	1
6	Sutera	1	3
7	Lengayang	2	2
8	Ranah Pesisir	3	0
9	Linggo Sari Baganti	3	3
10	Airpura	0	2
11	Pancung Soal	0	2

12	Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0
13	Basa Ampek Balai Tapan	1	0
14	Lunang	0	2
15	Silaut	0	0
	Jumlah	29	25

Sumber: Data UPPA Polres Kab Pessel 2019

Tabel 9.3 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terbanyak terjadi di Kecamatan IV Jurai yaitu sebanyak 9 kasus, dan terendah di Kecamatan Silaut (0 kasus).

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Penduduk Pesisir Selatan Tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu 253.812 jiwa berbanding 257.913 jiwa.
2. Struktur umur penduduk Pesisir Selatan didominasi oleh penduduk muda dengan frekuensi terbesar pada kelompok umur 15 – 19 tahun.
3. Komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu 49,64 berbanding 50,40 persen.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar , laki-laki Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih rendah dibanding Perempuan pada Sekolah Menengah Pertama untuk Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA) kewenangan Data berada di Provinsi.
5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada tingkat pendidikan SD dan SMP.
6. Angka Buta Huruf (ABH) mengalami tren penurunan dalam tahun 2016.
7. Persentase penduduk perempuan yang menamatkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

8. Angka Harapan Hidup Penduduk Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah 70,73.
9. Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan adalah 90 per 100.000 kelahiran hidup.
10. 8844 persalinan di Pesisir Selatan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.
11. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K1/K4) sebesar 9893.
12. Terdapat 0 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
13. Persentase Akseptor KB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yaitu 10.792 persen.
14. Angka pernikahan pada usia anak masih cukup tinggi yaitu 60,9 persen pada usia 16 – 24 tahun, dan 32,3 persen pada usia di bawah 16 tahun.
15. Penduduk usia kerja terbesar pada kelompok usia 30-34 tahun, yaitu laki-laki sebesar 43 persen.
16. Pada semua kelompok umur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih besar dari pada perempuan.
17. Penduduk perempuan yang bekerja hanya sekitar 38,70 persen untuk laki-laki 61,30 persen, dengan status pekerjaan terbanyak sebagai buruh/karyawan/ pegawai.
18. Lowongan dan penempatan kerja di Pesisir Selatan masih didominasi laki-laki.
19. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 orang dari 45 orang jumlah anggota DPRD (6,6 persen).
20. 243 dari 656 jabatan struktural di Kabupaten Pesisir Selatan ditempati oleh perempuan.
21. Terdapat 17 organisasi perempuan yang terdaftar di Kabupaten Pesisir Selatan.
22. Jumlah lansia terlantar yaitu 13.755 pada tahun 2018.

23. Jumlah penyandang disabilitas tahun 2018 yaitu 877 orang laki-laki dan 694 perempuan.
24. Jumlah perempuan rawan ekonomi 6.453 orang pada tahun 2019.
25. Peserta PAUD terbanyak pada jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu sebanyak 11.178 orang.
26. Terdapat 66 kematian bayi usia 0-1 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.
27. Terdapat 12 balita usia 1 - 4 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan 2019.
28. Capaian ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan pada Tahun 2019.
29. Jumlah anak jalanan tidak ada.
30. Tahun 2019 tidak terdapat lagi pekerja anak di Pesisir Selatan.
31. Kekerasan terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (84,41 persen), sedangkan kekerasan terhadap anak terbanyak berupa kekerasan seksual (51,76 persen).

## **B. Saran**

1. Para pengambil kebijakan di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan untuk mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam menyusun perencanaan pembangunan di segala bidang.
2. Tingkat pendidikan perempuan Pesisir Selatan relatif cukup baik, namun bertolak belakang dengan kesempatan kerja yang dimilikinya. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan kebijakan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan.
3. Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Pencatatan Sipil Kabupaten diharapkan dapat meningkatkan upaya promosi alat kontrasepsi pria sehingga cakupan peserta KB pria terus meningkat.

4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan beserta Kementerian Agama dan seluruh instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama untuk menurunkan angka pernikahan usia anak melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik, khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Kesehatan Pesisir Selatan diharapkan untuk meningkatkan frekuensi upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitatif kesehatan sehingga derajat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pesisir Selatan lebih optimal.

